

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA IKUT  
SEJAHTERA (GADIS) DI KECAMATAN NEGERI KATON  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Nur Indah**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GADIS) DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017**

Oleh :

Nur Indah

Program GaDIS bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan kerja melalui berbagai kegiatan usaha yang dikelola BUMDes, namun hal tersebut belum tercapai di Kecamatan Negeri Katon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon tahun 2017. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Karang Rejo, Desa Poncokresno, Desa Sinar Bandung dan Desa Purworejo sebagai pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon periode 2017 sudah efektif, karena lebih banyak indikator efektivitas yang terpenuhi seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Hanya Desa Sinar Bandung dan Purworejo yang belum memenuhi indikator tercapainya tujuan, dari 11 kegiatan unit usaha, 6 unit usahanya sudah efektif seperti usaha simpan pinjam dan produksi kerajinan tapis di Desa Karang Rejo, produksi kripik / kelanting dan ternak kambing di Desa Poncokresno, simpan pinjam dana usaha di Desa Sinar Bandung dan sewa tarup di Desa Purworejo.

**Kata Kunci : Efektivitas, Program GaDIS**

## **ABSTRACT**

### **EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION PROSPEROUS VILLAGE MOVEMENT PROGRAM (GADIS) IN THE DISTRICT OF NEGERI KATON OF PESAWARAN REGENCY**

By :

Nur Indah

GaDIS program aims to empower the community so that it can improve living standards and create jobs through various business activities managed by BUMDes, but this has not been achieved in the District of Negeri Katon. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the GaDIS program in the District of Negeri Katon in 2017. This type of research is descriptive qualitative, using the method of interview, observation and documentation. The results of this study indicate that Karang Rejo Village, Poncokresno Village, Sinar Bandung Village and Purworejo Village as the implementation of the GaDIS program in the Negeri Katon Subdistrict for the 2017 period have been effective, because more indicators of effectiveness are fulfilled such as understanding programs, on target, on time, achieving goals and real change. Only Sinar Bandung and Purworejo villages have not fulfilled the indicators for achieving the objectives, out of 11 business unit activities, 6 business units have been effective such as savings and loan business and filter craft production in Karang Rejo Village, production of chips / goats and goats in Poncokresno Village, savings and loans business funds in Sinar Bandung Village and rent tarups in Purworejo Village.

**Keyword : Effectiveness, GaDIS Program**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA IKUT  
SEJAHTERA (GADIS) DI KECAMATAN NEGERI KATON  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017**

**Oleh**

**Nur Indah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi

: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA  
(GaDIS) DI KECAMATAN NEGERI KATON  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017**

Nama Mahasiswa

: **Nur Indah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1516021033**

Jurusan

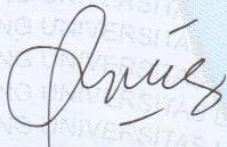
: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

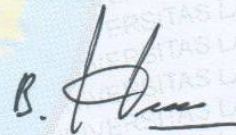
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

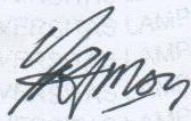
**NIP 19690219 199403 2 001**



**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**

**NIP 19680112 199802 1 001**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

**NIP 19611218 198902 1 001**



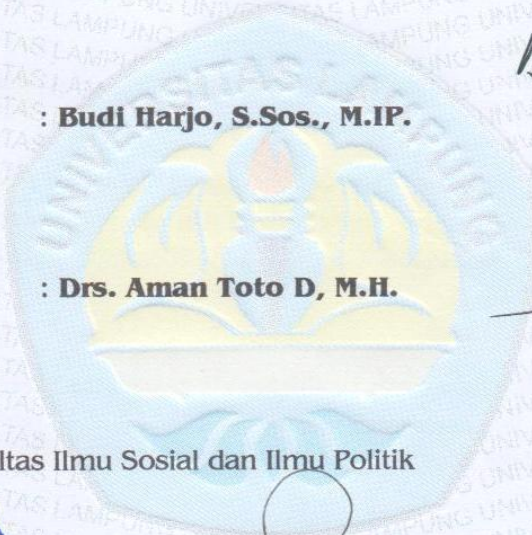
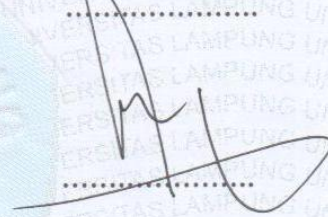
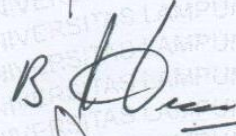
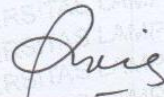
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

**Sekretaris : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**

**Penguji : Drs. Aman Toto D, M.H.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**  
**NIP 19590803 198603 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2019**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juli 2019

Vang Membuat Pernyataan



*Nur Indah*  
Nur Indah  
NPM. 1516021033

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Nur Indah. Lahir di Tanjung Jaya pada tanggal 22 April 1997 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Saminudin dan Ibu Murniati. Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari Sekolah Dasar di SD N 1 Tanjung Rejo tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Gedong Tataan tahun 2009 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA N 3 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur masuk SNMPTN. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) pada bulan Januari tahun 2018 di Pekon Badak Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.



## *MOTTO*

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”*

*(QS. Al-Baqaroh : 216)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(QS. Al-Insyirah : 5-6)*

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tepat waktu

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayah, Ibu, Kakak serta Adikku tersayang sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.  
Terimakasih atas segala doa dan restu yang telah kalian berikan

Terima kasih untuk keluarg besar Jurusan Ilmu Pemerintahan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan berkah bagi kita semua

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillahil'amin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Desa Ikt Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini antara lain yaitu :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang penulis banggakan, sayangi dan cintai, terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang tidak mampu penulis balas segala jasa, kebaikan, dan ketulusannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan dari Ayah dan Ibu.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan, kritik, serta saran yang ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian terhadap penulis yang telah ibu berikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada ibu dimanapun ibu berada.
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis terlebih lagi meluangkan banyak waktu, tenaga maupun pikiran dalam memberikan banyak masukan guna terciptanya skripsi ini. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian terhadap penulis yang telah bapak berikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada bapak dimanapun bapak berada.
6. Bapak Drs. Aman Toto D, M.H selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis. Terima kasih kepada Bapak Aman Toto, selain sebagai dosen pembahas Bapak Aman Toto juga memiliki kontribusi penuh dalam perbaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik dan terstruktur. Masukan dan saran yang bapak berikan sangat



bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah kepada bapak dimanapun bapak berada.

7. Seluruh dosen dan staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah kepada bapak dan ibu dimanapun kalian berada.
8. Seluruh informan penulis, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu di dunia maupun di akhirat.
9. Teruntuk sahabat dalam segala kondisi Syairini Hasanah, S.Pd, Dea Oktaviani, S.Sos dan Ayu Riskyia Melati S.AN, terima kasih atas segala waktu, kenangan, kasih sayang, bantuan, motivasi, keceriaan, kejahilan dan kepanace'an yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menemani penulis selama ini dan selalu siap siaga ketika penulis repotkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam mencapai impian kita dan semoga hubungan baik ini tetap terjalin sampai kapanpun.
10. Teruntuk Muhammad Syafaat, S.H terima kasih sudah menemani penulis dari awal masuk kuliah hingga selesai, selalu siap siaga ketika penulis repotkan, menjadi pendengar dan penasehat yang baik ketika penulis sedang ada masalah. Semoga hubungan baik ini tetap terjalin sampai kapanpun. Tetap semangat dan selalu optimis untuk mencapai kesuksesan kita bersama.

11. Teman-teman SMA, Novita, Tami, Altina Ferninda, S.E, Ineke Chintya Dewi, S.E, Diah, Fitri Diana, S.Pd, Edo, Andre, Toni, Rajis, Roni terimakasih sudah kebersamai masa-masa SMA yang tidak seindah siswa-siswi SMA lain, tapi bersama kalian masa-masa itu bisa dilewati. Tetap semangat, optimis dan terus jalin silaturahmi dalam mencapai kesuksesan kita bersama. *Love you all.*
12. Teman-teman masa kuliah, Hardining Tyas, S.IP, Ni Kadek Poniasih, S.IP, Annisa Erlitsya Marchelina, S.IP, Aprillia, S.IP, Sri Mulyaningsih, S.IP, Lisdaria, S.IP, Widia Novita Lukita WA, S.IP, Amelisa Nurzahara, S.IP, Mela Gustiana, S.TP, Nikadek Novi Indiani, Amd, Novita Sari, S.IP, Ifa Nurul Khotimah, S.IP, Ismi Ma'rifah, S.IP, Vina Naru Lita, S.IP, Destriana Hutabarat, S.IP, Tiolina Gultom, S.IP, Khairunnisa Maulida, S.IP, Putri Wahyuni, S.IP, Alek Sanjaya, S.IP, Robiul Zikri, S.IP, Robi Ahmadi, S.IP, Masrani Inda P, S.IP, Dina Mei F, S.IP, Sekar Arum M, S.IP, Diska Aryanti, S.IP, Irda Yustina, S.IP, Merita Andriani, S.IP, Fernanda Argie, S.IP, Dewi Arya K.P, S.IP, Annisa Putri, S.IP, Anisa Rizky, S.IP, Ayuni Zalita Pepi, IP, Zenia Fidea W, S.IP, Rachmiati Sari, S.IP, Dara Atika, S.IP, Santini, S.IP, Feygi Z, S.IP dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani masa perkuliahan penulis dan segala canda tawa, dukungan serta motivasi yang diberikan satu sama lain. Semoga kesuksesan berpihak pada kita.

Bandar Lampung, 29 Juni 2019  
Penulis

Nur Indah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Efektivitas.....	16
1. Pengertian Efektivitas .....	16
2. Ukuran-Ukuran Efektivitas.....	18
B. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat .....	22
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	22
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	24
C. Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) .....	26
D. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	29
1. Pengertian BUMDes .....	29
2. Tujuan Dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	31
E. Kerangka Pikir Penelitian .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Teknik Penentuan Informan.....	42
E. Informan .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44

1. Wawancara Mendalam .....	44
2. Observasi .....	45
3. Dokumentasi .....	45
G. Teknik Pengelolaan Data .....	45
1. Penyuntingan ( <i>Editing</i> ) .....	46
2. Intepretasi.....	46
H. Teknki Analisis Data .....	47
1. Reduksi Data ( <i>data reduction</i> ).....	47
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	47
3. Penarikan Kesimpulan ( <i>Verifycation</i> ).....	48
I. Teknik Keabsahan Data .....	48

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran .....	50
1. Letak Geografis.....	50
2. Keadaan Demografi .....	51
B. Gambaran Umum Kecamatan Negeri Katon ..	51
1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Negeri Katon.....	51
2. Letak Geografis.....	52
3. Keadaan Demografi .....	53
4. Keadaan Iklim.....	53
C. Gambaran Umum Desa Purworejo .....	54
D. Gambaran Umum Desa Poncokresno .....	54
E. Gambaran Umum Desa Karang Rejo.....	55
F. Gambaran Umum Desa Sinar Bandung .....	55

#### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pemahaman Program .....	66
1. Sumber Informasi Tentang Program GaDIS .....	66
2. Pemahaman Penerima Program Setelah Mengetahuan Tentang Program GaDIS .....	80
B. Tepat Sasaran .....	93
1. Desa Yang Mendapatkan Nilai Tertinggi .....	94
2. Desa Yang Memperoleh Bantuan Keuangan Program GaDIS Tidak Boleh Menerima Bantuan Secara Berturut-Turut Dari Program GaDIS.....	113
C. Tepat Waktu.....	117
1. Frekuensi Awal Pelaksanaan Program GaDIS Sampai Akhir Pelaksanaan Program GaDIS.....	117
2. Keberlangsungan Program.....	121



D. Tercapainya Tujuan Program .....	135
1. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa .....	135
2. Terciptanya Lapangan Kerja/ Pemberdayaan Masyarakat.....	148
E. Perubahan Nyata.....	173
1. Kemajuan BUMDes.....	173
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat .....	182

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	201
B. Saran .....	203

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data BUMDes di Provinsi Lampung .....	3
2. Jumlah Desa Penerima Program GaDIS Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran .....	6
3. Data Luas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Pesawaran .....	7
4. Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Program GaDIS Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 .....	9
5. Penelitian Terdahulu .....	11
6. Data Informan .....	43
7. Jumlah Desa di Kecamatan Negeri Katon .....	52
8. Efektivitas Pelaksanaan Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017 Pada Indikator Pemahaman Program .....	92
9. Kegiatan Usaha BUMDes Penerima Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017 .....	111
10. Efektivitas Pelaksanaan Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017 Pada Indikator Tepat Sasaran .....	116
11. Kegiatan Unit Usaha Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon.....	132
12. Efektivitas Pelaksanaan Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017 Pada Indikator Tepat Waktu .....	134
13. Efektivitas Pelaksanaan Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017 Pada Indikator Tercapainya Tujuan.....	171
14. Efektivitas Pelaksanaan Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017 Pada Indikator Perubahan Nyata .....	192
15. Triangulasi Data Penelitian .....	193

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	36

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Indonesia baru dapat disebut makmur jika desa ikut makmur.. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan desa yaitu berupa dana desa guna kepentingan desa dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuat paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tatakelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia.

Untuk mengelola dana desa salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan dana Desa.



Hal tersebut tercantum dalam Permendes Nomor 19 Bab III pasal 4 (ayat 1-5) Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatakan bahwa :

“Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk 2 unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUMDes atau BUMDes bersama, embung, dan sarana olahraga d esa sesuai dengan kewenangan desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Namun sayangnya dengan banyaknya kegunaan dari BUMDes tersebut tak lantas membuat setiap desa di Indonesia memiliki BUMDes. Masih sedikit BUMDes yang sudah terbentuk di setiap desanya, yang dimaksud BUMDes yang sudah terbentuk disini menurut Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pasal 5 (ayat 1-3) dan Pasal 6 (ayat 1-4) serta Bab III Pasal 9 dan 10 (ayat 1) mengatakan bahwa :

“BUMDes yang sudah terbentuk adalah BUMDes yang sudah disepakati melalui musyawarah desa dan sudah disahkan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, selanjutnya BUMDes tersebut sudah memiliki struktur kepengurusan atau kepengelolaan. Sebaliknya BUMDes yang belum terbentuk adalah BUMDes yang belum disepakati melalui musyawarah desa dan belum disahkan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Meteri 4 Desa, selanjutnya

BUMDes tersebut belum memiliki struktur kepengurusan atau pengelolaan”.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih tergolong rendah adanya BUMDes adalah Provinsi Lampung. Berikut data BUMDes di Provinsi Lampung Tahun 2014.

**Tabel 1. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung Tahun 2015**

No	Kabupaten	Jumlah Desa/ Pekom	Jumlah BUMDes
1.	Lampung Selatan	256	20
2.	Lampung Tengah	297	41
3.	Lampung Utara	232	4
4.	Lampung Barat	131	-
5.	Tulang Bawang	147	3
6.	Tanggamus	299	2
7.	Lampung Timur	264	3
8.	Way Kanan	215	1
9.	Pesawaran	144	8
10.	Pringsewu	126	25
11.	Mesuji	105	-
12.	Tulang Bawang Barat	93	4
13.	Pesisir Barat	116	1
14.	Bandar Lampung	0	-
15.	Metro	0	-
Jumlah		2425	112

Sumber : Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemerintah Provinsi Lampung, 2015.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa masih banyak desa di Provinsi Lampung yang belum memiliki BUMDes. Dari jumlah desa 2.425 hanya 112 desa saja yang memiliki BUMDes. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang masih tergolong memiliki BUMDes sedikit adalah Kabupaten Pesawaran. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Pesawarn hanya 8 desa yang memiliki BUMDes. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran di bawah pimpinan Bupati Dendi

Romadhona membuat suatu program unggulan di masa jabatannya, yaitu program Gerakan Desa Ikut Sejahterayang kemudian disingkat GaDIS.

Program ini dibuat sebagai implementasi atas otonomi daerah. Syafiie (2011:64) otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Cansil dan Christine (2008:3) mengatakan bahwa dalam hal otonomi daerah prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu. Desa diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, akan tetapi hakikat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program GaDIS adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan desa tangguh dan mandiri. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tujuan bantuan keuangan GaDIS adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi bernilai ekonomis dan inovatif demi kemajuan desa dan terciptanya lapangan kerja. Program ini ditekankan untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) <http://www.pesawarankab.go.id> (diakses pada 17 November 2018 pukul 11.02 WIB).

Program ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran memberikan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah kepada 44 desa yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati, sehingga tidak sembarang desa yang dapat menerima program ini, hanya desa yang dapat memenuhi kriteria yang bisa mendapat program GaDIS. <http://www.pesawarankab.go.id> (diakses pada 17 November 2018 pukul 11.02).

Kriteria tersebut diantaranya seperti tertib administrasi desa, lunas PBB, siskamling, inovasi PKK dan terutama adalah dokumen perencanaan BUMDes. Berkenaan dengan usulan desa penerima bantuan keuangan GaDIS tahun anggaran berjalan, kewenangan sepenuhnya ada pada camat. Berikut dilampirkan tabel jumlah desa penerima program GaDIS tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran.



**Tabel 2. Jumlah Desa Penerima Program GaDIS tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
1	Way Lima	1. Padang Manis 2. Cimanuk 3. Kuta Dalom 4. Pekon Doh
2	Punduh Pedada	1. Bawang 2. Bangunrejo 3. Banding Agung 4. Kota Jawa
3	Way Ratai	1. Mulyosari 2. Gunung Rejo 3. Ceringin Asri 4. Wates Way Ratai
4	Kedondong	1. Kedondong 2. Tempelrejo 3. Pesawaran 4. Kertasana
5	Gedong Tataan	1. Bogorejo 2. Taman Sari 3. Kebagusan 4. Gedong Tataan
6	Padang Cermin	1. Banjaran 2. Hanau Berak 3. Gayau 4. Trimulyo
7	Marga Punduh	1. Sukajaya Punduh 2. Pekon Ampai 3. Umbul Limus 4. Kunyaian
8	Negeri Katon	1. Sinar Bandung 2. Ponco Kresno 3. Karang Rejo 4. Purwo Rejo
9	Way Khilau	1. Kubu Batu 2. Penengahan 3. Padang Cermin 4. Sukajaya

**Lanjutan ( Tabel Jumlah Desa Penerima Program GaDIS Tahun 2017)**

No	Kecamatan	Desa
10.	Teluk Pandan	1. Hanura 2. Tanjung Agung 3. Hurun 4. Sidodadi
11.	Tegineneng	1. Bumi Agung 2. Margo Mulyo 3. Sinar Jati 4. Negara Ratu Wates

Sumber : Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran (Jumlah Desa Penerima Program GaDIS Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan tabel 2 di atas menjelaskan bahwa desa yang mendapat program GaDIS sejumlah 44 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan tabel 2 desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program GaDIS salah satunya adalah desa-desa di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, diantaranya Desa Purworejo, Desa Karang Rejo, Desa Sinar Bandung dan Desa Poncokresno. Luas wilayah yang cukup besar dan jumlah desa yang cukup banyak tak lantas membuat Kecamatan Negeri Katon mampu untuk membuat BUMDes dan mengelola serta memanfaatkan dana permodalan GaDIS di setiap desanya yang mendapatkan GaDIS. Berikut dilampirkan data luas wilayah kecamatan se- Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.

**Tabel 3. Data Luas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Pesawaran tahun 2015.**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Punduh Pidada	11	110,46
2.	Marga Punduh	10	128. 22
3.	Padang Cermin	11	139.9
4.	Kedondong	12	73,37
5.	Way Khilau	10	62.8
6.	Way Lima	16	168.79
7.	Gedong Tataan	19	165,2
<b>8.</b>	<b>Negeri Katon</b>	<b>19</b>	<b>142.13</b>
9.	Tegineneng	16	142. 63
10.	Teluk Pandan	10	122. 19
11	Way Ratai	10	127.21

Sumber : [www.pesawarankab.go.id](http://www.pesawarankab.go.id)

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa Kecamatan Negeri Katon merupakan wilayah terluas keempat setelah Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Tegineneng dengan jumlah desa terbanyak yaitu 19 desa dengan luas wilayah sebesar 142.13 km<sup>2</sup>. Selain itu Kecamatan Negeri Katon adalah kecamatan yang tercatat belum banyak melibatkan masyarakat dalam kegiatan BUMDes yang bersumber dari modal program GaDIS. Berikut dilampirkan catatan hasil monitoring dan evaluasi *team* koordinasi program GaDIS terhadap pelaksanaan program GaDIS pada tahun 2017 di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

**Tabel 4. Data Hasil Monitoring Dan Evaluasi Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2019**

No	Desa/ Nama Bumdes	Jenis Usaha Bumdes Dari Bantuan Keuangan GaDIS	Catatan Monev
1	sinar bandung/ sinar bandung	1. sewa alat pertanian 2. ternak sapi 3. Kegiatan LKM	pembayaran dan kapasitas aset, sebagai dasar pemberian kredit dipelihara oleh ketua BUMDes, maka <b>tidak ada sisi pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan.</b>
2	Poncokresno/Pancajaya	1. pengembangan usaha keripik singkong dan klanting 2. pengembangan usaha ternak kambing 3. usaha alat pertukangan	1. bahan baku produksi ternyata sangat minim di Desa Ponco Kresno, sementara belum ada suplai dari desa sekitar  2. pemasaran banyak dan beragamnya usahawan serupa baik kualitas maupun kuantitas, mengharuskan BUMDes mampu berinovasi dan <i>up to date</i> informasi mengenai seluk beluk dunia peternakan persaingan terutama saat idul qurban dimana banyak yang telah sistematis memasarkan, kandang tertata bersih, dan bobot ternak yang maksimal.
3	Karang Rejo/ Karya Mandiri	1. kerajinan rakyat / tapis 2. budidaya ikan air tawar (gurame, lele) 3. kegiatan simpan pinjam	1. <b>kurang memberdayakan masyarakat</b> , terlebih kolam menggunakan milik kepala desa dan berada di area rumah kepala desa  2. pembukuan belum berjalan dengan baik
4	Purworejo / Surya Indigo	1. budidaya ikan lele 2. ternak kambing Peranakan Ettawa (PE)	1. <b>belum mengikutsertakan masyarakat untuk diberdayakan melalui usaha BUMDes</b>  2. pembangunan kandang dari dana GaDIS

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran (Catatan Hasil Monev Pelaksanaan Program GaDIS di Negeri Katon Tahun 2017).

Tabel 4 menunjukkan catatan hasil monitoring dan evaluasi *team* koordinasi GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Tahun 2017. Terlihat bahwa dari catatan hasil monev menjelaskan kegiatan usaha di Desa Sinar Bandung, Karang Rejo dan Purworejo belum mengikutsertakan masyarakat sehingga tidak ada sisi pemberdayaan yang dapat dilakukan. Namun data tersebut belum menunjukkan kegiatan usaha apa yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan hasil monev *team* koordinasi GaDIS, pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon tercatat masih minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain, sedangkan dalam <http://gerbangrepublik.com> (diakses pada 18 November 2018 pukul 09.46 WIB) menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban atas pelaksanaan usaha BUMDes yang didanai oleh program GaDIS agar terlaksana dengan baik dan berkelanjutan di tahun berikutnya melalui Dana Desa (DD) demi semata-mata mewujudkan konstruksi keberdayaan dan kemandirian desa menuju desa tangguh dan mandiri. Oleh sebab itu pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul efektivitas pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, beberapa penelitian yang juga membahas tentang pelaksanaan program baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut dilampirkan tabel penelitian terdahulu.

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Putri Dian Purnama	2016	Skripsi	Efektivitas Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015
2	Intan Riana Dewi	2016	Skripsi	Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka Di Gunungterang Pakulaman Yogyakarta
3.	Nicko Santer	2015	Jurnal	Implementasi Program Gerakan Desa Membangun di Kecamatan Malinau Utara Kabupate Malinau (Studi Tentang Pembangunan infrastruktur Jalan di Desa Semanggaris dan Desa Luso)
4	Rahmad Hidayat Batubara	2015	Skripsi	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang
5.	Fatimah Zahrotul Hayati	2016	Skripsi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Sumber : diolah peneliti

Penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program P3KSS yang dilaksanakan di Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian pertama ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah efektivitas pemberdayaan sebagian besar sudah tercapai, namun ada beberapa hal yang belum. Teori yang digunakan dalam penelitian pertama ialah indikator ukuran efektivitas menurut Duncan ( Steers, 1984:53) adapun indiktaor yang digunakan ialah pertama

pencapaian tujuan kedua integrasi ketiga adaptasi. Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti efektivitas pelaksanaan program dengan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun yang membedakan ialah program yang diteliti kemudian lokasi penelitian dan teori yang digunakan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah indikator atau ukuran-ukuran efektivitas menurut Sutrisno (2007 : 125-126) dengan indikator diantaranya pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Program yang diteliti dalam penelitian ini ialah efektivitas pelaksanaan program Grakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap kelompok soka di Gununggratu Pakualaman Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian kedua ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian kedua ialah teori efektivitas menurut Sutrisno (2007 : 125-126) adapun indikator nya diantaranya pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Hasil penelitian kedua menunjukkan pelaksanaan program ada yang sudah berjalan dengan efektif namun juga ada yang belum berjalan dengan efektif. Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti



efektivitas pelaksanaan program dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (20017:125-126), kemudian metode yang digunakan dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pun sama. Namun yang membedakan adalah program yang diteliti dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini program yang diteliti ialah efektivitas pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ketiga bertujuan untuk mengetahui implementasi program GerDeMa dalam pembangunan infrastruktur. Hasil nya adalah implementasi program GerDeMa sudah baik. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pihak pemerintah dan Dinas Pekerja Umum. Penelitian keempat berfokus pada partisipasi masyarakat, peran kelompok masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan hubungan antara peranan kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program GSMK di Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Hasil penelitian keempat adalah sebagian besar masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik walaupun masih terdapat masyarakat yang belum berpartisipasi dengan baik. Selain itu peran pokmas sudah baik dan menunjukkan semakin tinggi peran pokmas maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Kemudian penelitian kelima berfokus pada tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan hasil yang dicapai dalam pemberdayaan tersebut. Hasil dari penelitian kelima ialah meningkatkan ketrampilan,

meningkatkan jiwa kemandirian dan meningkatkan partisipasi anggota kelompok.

Berdasarkan hal tersebut di atas, *relevansi* penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang program peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari pemerintah pusat maupun daerah, namun dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan belum semua program mampu memberikan banyak perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan program tersebut.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran, yang akan menghasilkan efektif atau tidak efektifnya suatu program. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan program khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan yang mengambil kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya pada program GaDIS.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Efektivitas**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif mempunyai arti efektif, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil, jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa diartikan dengan pengertian efisien meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Menurut Siagian (dalam Sinaga Afrianita, 2017:28) efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membedakan input dan outputnya.

Menurut Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan

dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Gibson (Dalam Dharma Agus, 2001:120), efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.

H. Emerson (dalam Handyaningrat, 1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Kemudian menurut Bungkaes (2013:45) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Selain itu Kurniawan (2015:109) menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang ideal dari suatu program atau kegiatan yang telah disepakati, kemudian kegiatan yang telah dilakukan memberikan dampak, manfaat dan hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

## 2. Ukuran-Ukuran Efektivitas

Menurut Blake (Dalam Sinaga Afrianita, 2017:31) mengatakan bahwa apa yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah rencana yang dibangun diatas organisasi dan kemitraan dalam masyarakat dan membahas kebutuhan sosial, budaya dan lingkungan masyarakat serta ekonomi. Setelah pembangunan rencana diatas organisasi dan kemitraan dibuat, baru dapat dikatakan efektif jika tidak hanya memandang satu sektor kehidupan saja.

Menurut Muasaroh (2010:13) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain :

- a) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif apabila melaksanakan tugas atau fungsinya.
- b) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana suatu rencana kegiatan yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif.
- c) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.
- d) Aspek tujuan dan kondisi ideal, suatu program dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya Strees (dalam Tangkilisan, 2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a) Produktivitas
- b) Kemampuan adaptasi kerja
- c) Kepuasan kerja
- d) Kemampuan ber laba
- e) Pencarian sumber daya

Selain itu Duncan (dalam Steers,1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor seperti, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

- b) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Selanjutnya, menurut Sutrisno (2007:125-126) menjelaskan bahwa sebuah program atau kegiatan dapat diukur menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui sejauh mana keefektifan program didalam sebuah organisasi. Berikut indikator yang harus diperhatikan dalam pengukuran diantaranya :

1. Pemahaman Program

Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaanyapihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

2. Tepat Sasaran

Sasaran yang dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal. Berdasarkan penelitian ini bahwa sasaran yang menjadi pokok bahasan dalam program ialah desa penerima program GaDIS.



### 3. Tepat Waktu

Indikator selanjutnya ialah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketepatan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan / program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

### 4. Tercapainya Tujuan

Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan program GaDIS dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak tujuan yang tercapai maka semakin efektif program yang dilaksanakan.

### 5. Perubahan Nyata

Dalam point terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program GaDIS ini dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian sasaran dari program GaDIS juga sangat berperan penting dalam pelaksanaan program. Artinya, dengan melihat, meninjau dan meneliti langsung apakah program GaDIS memberikan perubahan khususnya bagi kemajuan BUMDes dan kemandirian desa serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kategori dampak positif maupun negatif.

Berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang telah dijelaskan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas pelaksanaan program menurut Sutrisno (2007:125-126). Alasan peneliti menggunakan teori ini karena indikator yang ada lebih tepat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program, sedangkan teori efektivitas yang lain lebih tepat untuk mengukur efektivitas kerja suatu perusahaan atau organisasi.

Selain itu indikator yang ada sesuai dengan apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program GaDIS dibandingkan dengan teori yang lain. Adapun indikator efektivitas pelaksanaan program menurut Sutrisno (2007:125-126) ialah pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

## **B. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan atau kekuatan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Suharto (2014:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik dan ekonomi.

Menurut Sumodingrat (dalam Mardikanto dan Soebiato,2015:33-34) pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif memenuhi proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan <http://id.m.wikipedia.org> (diakses pada 25 November 2018 pukul 14.33 WIB).

Subejo (dalam Mardikanto, 2013:45) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki

melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## **2. Tujuan pemberdayaan masyarakat**

Mardikanto dan Soebiato (2015:111-112) menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan meliputi :

- a. Perbaikan Pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat, waktu serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat. Tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- b. Perbaikan Aksesibilitas (*better accesbility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat hidup diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan

sumber inovasi / informasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan Tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang lebih baik.

e. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan yang sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

I. Perbaikan Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Menurut Ambar Teguh (2004:80-81) mengatakan bahwa melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

### **C. Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera ( GaDIS )**

Program GaDIS merupakan program Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk 44 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran. Program ini merupakan salah satu program unggulan di bumi andan jejama. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran, program GaDIS dimaksudkan untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri melalui penguatan BUMDes. Dalam <https://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.07 WIB) Bupati Pesawaran menyerahkan bantuan kepada 44 desa di aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat 17 September 2017 .

Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona dalam berita online [www.pesawarankab.co.id](http://www.pesawarankab.co.id) (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.10

WIB) menyatakan bahwa program Gerakan Desa Ikt Sejahtera yang kemudian di singkat (GaDIS) adalah inovasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai pemberian reward atau penghargaan kepada desa berprestasi yang ada di Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu tidak sembarang desa yang dapat menerima bantuan dana GaDIS. Beragam kriteria harus dapat dipenuhi oleh desa yang mendapat program GaDIS.

Adapun kriteria-kriteria desa yang menerima program GaDIS tercantum dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikt Sejahtera Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut :

1. Desa yang memperoleh Bantuan keuangan gadis adalah desa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan kriteria:
  - a. Berprestasi di tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi/nasional
  - b. Memiliki RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa
  - c. Memiliki tertib manajemen administrasi pemerintahan desa menurut standar evaluasi perkembangan desa.
  - d. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
  - e. Dalam hal tidak terdapat desa yang lunas PBB, maka akan mempertimbangkan desa dengan capaian PBB tertinggi.
  - f. Penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi APBDesa secara tepat waktu.
  - g. Memiliki BUMDes yang lengkap secara administrasi, meliputi berita acara pembentukan, peraturan desa tentang BUMDes,

ADART, rencana usaha dan struktur organisasi yang proporsional serta sumber daya manusia yang profesional.

- h. Melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan (SKL).
  - i. Memiliki perencanaan inovatif yang sinkron dengan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
  - j. Bersedia menandatangani fakta integritas.
2. Desa yang memperoleh bantuan keuangan GADIS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut dari program ini.
  3. Desa-desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan GADIS dengan keputusan bupati.

Dendi Romadhona dalam berita online <https://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.23 WIB) menjelaskan bahwa sebagai program yang ditekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana GaDIS yang berjumlah 100 juta rupiah untuk setiap desa tersebut, merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) .

Lebih lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran M. Zuriadi dalam berita online <http://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.27 WIB ) memaparkan program GaDIS diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi desa melalui BUMDes serta memberikan peluang positif bagi Pendapatan Asli Desa



(PAD) sehingga dapat menjadi salah satu cara efektif dalam rangka memberikan wahana aktualisasi desa dan masyarakat secara keseluruhan agar memperoleh nilai tambah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Rendy Ahades dalam beritan online <http://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.27 WIB) menjelaskan dalam pengelolaan BUMDes, kepala desa selaku penanggung jawab mutlak, wajib menandatangani fakta integritas demi implementasi tersebut. Sehingga dapat terukur, terencana dan berkelanjutan. Pada prinsipnya bantuan keuangan GaDIS ini merupakan inisiatif usulan yang direncanakan oleh masyarakat desa itu sendiri, baik itu mulai dari perencanaan, kegiatan berjalan semuanya harus ditentukan dan diputuskan secara bersama oleh masyarakat. Tidak hanya wilayah pesisir tetapi disetiap kecamatan, kepala desa secara profesional harus mengembangkan destinasi objek pariwisata sebagai salah satu unit usaha.

#### **D. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

##### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha milik desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari masyarakat desa dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (6) tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 yang mengatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali

potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

## **2. Tujuan Dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Tujuan BUMDes adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Selanjutnya BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti .D Prasetyo,2002 bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut diperkuat dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga ( UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 3). Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Perlu adanya upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

## **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Berangkat dari pentingnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, maka pemerintah pusat membuat suatu kebijakan agar setiap desa mendirikan badan usaha yang dinamakan BUMDes. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama peningkatan perekonomian desa, namun sayangnya dengan banyaknya kegunaan dari BUMDes tersebut tak lantas membuat setiap desa di Indonesia memiliki BUMDes, salah satunya desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran masih sedikit BUMDes yang sudah terbentuk di setiap desanya.

Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Pesawaran membuat sebuah program yang dinamakan Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS). Program unggulan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran ini memberikan kewenangan kepada desa-desa untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan diberikanya bantuan dana sebesar 100 juta per desa, namun tidak semua desa dapat menerima program ini setiap tahunnya, hanya desa yang berhasil memenuhi kriteri yang dapat menerima program GaDIS.

Camat berwenang dalam penyeleksian desa penerima program GaDIS, sehingga eksistensi camat dalam pelaksanaan program ini cukup berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan atau program. Program GaDIS ini ditekankan untuk penguatan permodalan BUMDes dengan harapan dapat membantu desa dalam mengelola segala potensi yang ada di desanya agar lebih bernilai ekonomis dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, selain itu pula

segala usaha yang didirikan dapat menjadi manfaat baru bagi masyarakat khususnya dalam hal lapangan kerja.

Desa Sinar Bandung, Desa Poncokresno, Desa Purworejo dan Desa Karang Rejo merupakan desa-desa yang ada di Kecamatan Negeri Katon dan pada tahun 2017 telah menerima bantuan dana keuangan GaDIS dari pemerintah daerah. Tujuan dari adanya program GaDIS adalah untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi bernilai ekonomis dan inovatif demi kemajuan desa dan tercapainya lapangan kerja, sedangkan penekanan dari pelaksanaan program GaDIS ini adalah bagaimana program GaDIS yang dikelola BUMDes mampu menghasilkan bukan hanya profit melainkan juga sisi pemberdayaan.

Sebagai program yang di titik tekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana GaDIS yang berjumlah 100 juta rupiah untuk setiap desa, merupakan komponen pembiayaan dalam struktur APBDes, sehingga setelah dana tersebut di transfer ke rekening desa, maka desa harus mentransfernya ke rekening BUMDes untuk selanjutnya pengurus BUMDes lah yang akan mengelolanya sesuai jenis usaha yang diusulkan kepada *team* koordinasi GaDIS.

Dalam berita online <http://gerbangrepublik.com> (diakses pada 18 November 2018 pukul 09.44 WIB) menjelaskan bahwa pergerakan ekonomi desa melalui BUMDesa bukan saja memberikan peluang efek positif bagi Pendapatan Asli Desa (PAD), namun juga efek domino berupa tumbuhnya

inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal sehingga pada akhirnya program GaDIS dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam rangka memberikan wahana aktualisasi desa dan masyarakat secara keseluruhan agar memperoleh nilai tambah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

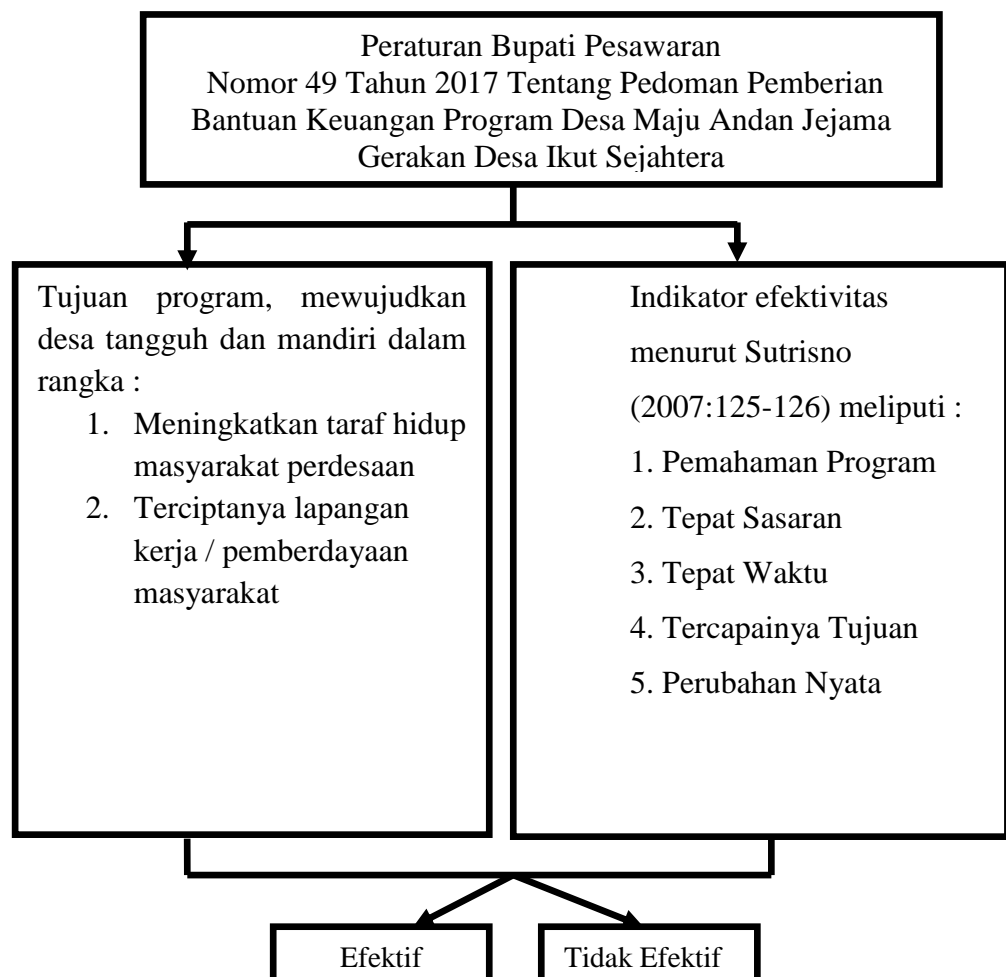
Dalam berita online <http://gerbangrepublik.com> (diakses pada 18 November 2018 pukul 09.46 WIB) kepala desa berkewajiban atas pelaksanaan usaha BUMDes yang di danai oleh program GaDIS agar terlaksana dengan baik dan berkelanjutan di tahun berikutnya melalui Dana Desa (DD) demi semata-mata mewujudkan konstruksi keberdayaan dan kemandirian desa menuju desa tangguh dan mandiri.

Berdasarkan hasil monev dari *team* koordinasi GaDIS, tahun 2017 masih terdapat kegiatan usaha BUMDes sebagai pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon belum melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada sisi pemberdayaan yang dapat dilakukan, sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan terciptanya lapangan kerja, sehingga pemberdayaan ke masyarakat menjadi hal yang penting.

Berdasarkan hal tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada efektifitas pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) diantaranya meliputi pemahaman program, tepat sasaran,

tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, maka akan terlihat efektif atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan.

Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dikatakan efektif jika semakin banyak indikator efektivitas program tersebut tercapai / terealisasi, begitupun sebaliknya, program GaDIS dikatakan tidak efektif jika masih banyak aspek-aspek efektivitas program belum terealisasi di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kerangka pikir penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis, penyampaian data dan informasi serta digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah untuk di pahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program yang di canangkan oleh Bupati Kabupaten Pesawaran Dendi Romadhona yaitu program Gerakan Desa Ikut Sejahtera ( GaDIS ).

Sugiyono (2015:1) mengatakan penelitian kualitatif ini sebagai metode yang muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenome-fenomena. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Menurutnya pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya bagian dari suatu keutuhan.

Kurniawan (2012:23) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pertimbangan lain dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah bahwa penelitian ini lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif deskriptif dengan secara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.

## **B. Fokus Penelitian**

Moleong (2015:93-94) mengatakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*). Melalui penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu ataupun mana yang akan dibuang.

Batasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut dipecahkan melalui penelitian dan akan menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu peneliti akan memfokuskan penelitian tentang

efektivitas pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran menggunakan teori efektivitas dengan melihat beberapa indikator efektivitas.

Sutrisno (2007:125-126) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya :

#### 1. Pemahaman Program

Pemahaman terhadap program yaitu sesuatu yang dikatakan efektif apabila penerima program GaDIS memahami apa yang menjadi tujuan dari program GaDIS, pemahaman terhadap program meliputi :

- a. Sumber informasi tentang program GaDIS
- b. Pemahaman setelah mendapatkan informasi tentang program GaDIS

#### 2. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran program yaitu sesuatu yang dikatakan efektif apabila desa penerima program GaDIS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria desa penerima program GaDIS berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut :

a. Desa yang mendapatkan nilai tertinggi

Desa yang memperoleh bantuan keuangan GaDIS adalah desa yang mendapatkan nilai tertinggi, kriteria Desa penerima program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon ialah sebagai berikut :

1. Berprestasi di tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi/nasional
2. Memiliki BUMDes

b. Desa yang memperoleh bantuan keuangan GADIS tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut dari program ini.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu pelaksanaan yaitu sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan. Tepat waktu meliputi :

- a. Frekuensi awal pelaksanaan program sampai akhir pelaksanaan program
- b. Keberlangsungan program

4. Tercapainya Tujuan Program

Tercapainya tujuan program yaitu hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan. Tercapainya tujuan meliputi :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan
- b. Terciptanya lapangan kerja / pemberdayaan masyarakat

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu perubahan yang dialami setelah program selesai dilaksanakan. Perubahan nyata meliputi :

- a. Kemajuan BUMDes
- b. Kesejahteraan Masyarakat

Program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dikatakan efektif jika semakin banyak indikator efektivitas program tersebut terealisasi, begitupun sebaliknya, program GaDIS dikatakan tidak efektif jika masih ada indikator efektivitas program belum terealisasi di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

### **C. Lokasi Penelitian**

Menurut Moleong (2015:128) cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan maka peneliti pun harus menjajaki lapangan tersebut.

Lokasi yang diambil di penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, karena Kecamatan Negeri Katon merupakan wilayah terluas ke empat di Kabupaten Pesawaran dengan jumlah desa terbanyak yaitu 21 desa, kemudian dari hasil monitoring dan evaluasi *team* koordinasi pelaksanaan GaDIS tahun 2017 bahwa masih terdapat kegiatan usaha yang belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, sedangkan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari adanya program tersebut. Oleh sebab itu lokasi ini dipilih untuk

melihat efektivitas pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Silalahi (2012:316-317) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan wawancara dan menentukan kualitas informasi yang diperoleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi langsung ialah pewawancara, yang diwawancarai, permasalahan yang hendak dicapai, dan proses pencatatan. Sedangkan, faktor-faktor yang berpengaruh tidak langsung ialah lingkungan tempat wawancara, berlangsung. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan *purposive sampling* dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon, maka informan yang ditujukan juga terkait langsung dengan pelaksanaan program tersebut.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah informan yang diwawancarai menguasai informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diselidiki yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan program GaDIS, kesediaan informan untuk diwawancarai dan memberi atau mengungkapkan secara tuntas dan objektif informasi yang berhubungan dengan masalah juga menentukan mutu wawancara.

## E. Informan

Bungin (2011:78) menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian.

Informan adalah orang-orang yang memahami langsung dalam penelitian ini. Informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sumber data dari peneliti ini adalah yang mampu memberikan informasi, menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Berikut data informan dalam penelitian ini :

**Tabel 6. Data Informan**

No	Nama	Jabatan
1.	Rendy Ahades Dwi Putra, SE.,MM	Koordinator GaDIS / Kabid III DPMD Kabupaten Pesawaran
2.	Rohayat, S.STP.,M.IP	Camat Negeri Katon
3.	Zainal Abidin	Kepala Desa Purworejo
4.	Mujahidin	Kepala Desa Poncokresno
5.	Cahyono	Kepala Desa Sinar Bandung
6.	Abdul Mutholib	Kepala Desa Karang Rejo
7.	Supriyanto	Ketua BUMDes Purworejo
8.	Rusdianto	Ketua BUMDes Sinar Bandung
9.	Mushof Ridho	Ketua BUMDes Karang Rejo
10.	Bili	Ketua BUMDes Poncokresno
11.	Sri Yuliati	Warga Desa Karang Rejo
12.	Boniyah	Warga Desa Karang Rejo
13.	Parni	Warga Desa Karang Rejo
14.	Jumono	Warga Desa Poncokresno
15.	Sarmani	Warga Desa Poncokresno
16.	Dedi Supriyadi	Warga Desa Sinar Bandung
17.	Odih	Warga Desa Sinar Bandung
18.	Karyono	Warga Desa Purworejo
19.	Kasimin	Warga Desa Purworejo

Sumber : Diolah peneliti (2019).

Pemilihan informan-informan di atas dipilih peneliti dengan pertimbangan berdasarkan kekuatan, posisi dan peran pentingnya dalam pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Arikunto (2016:100) mengatakan dalam teknik pengumpulan data ada macam-macam cara dalam tahap pengumpulan data, sesuai dengan tipe penelitian serta tersedianya waktu, biaya dan tenaga. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Zainal (2014:92) dan Sugiyono (2015:187&327) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berikut adalah cara peneliti dalam mengumpulkan data:

### **1. Wawancara Mendalam**

Bungin (2011:111) mengatakan wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman



wawancara. Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan dilokasi penelitian.

## 2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila informan yang diamati tidak terlalu besar. Adapun pengamatan yang peneliti lakukan adalah efektivitas pelaksanaan program GaDIS.

## 3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Catatan yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), kriteria, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GaDIS tahun 2017.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Sugiyono (dalam Hasanah, 2015:43-44) mengatakan pengolahan data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga data tersebut memiliki makna untuk menjawab masalah dari pertanyaan penelitian. Teknik pengolahan data merupakan teknik operasional setelah data terkumpul.

Silalahi (2012: 320) mengatakan ada tahap-tahap pengolahan data, pada penelitian ini pengolahan datanya adalah:

1. Penyuntingan (*Editing*)

Data harus diperiksa lagi kualitasnya. Proses memeriksa kembali kualitas data dalam instrumen dinamakan penyuntingan (*editing*). Diperiksa kembali kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman dan relevansi. Jika data yang didapat menunjukkan ada cacat yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya satu atau beberapa dari syarat data (lengkap, relevan, konsisten, akurat, seragam) harus dilakukan pengumpulan data ulang sesuai dengan kebutuhan dan harapan.

2. Interpretasi

Interpretasi atau menafsir berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis. Mustahil bagi seorang peneliti untuk menerangkan atau membuat tafsiran atas data mentah. Interpretasi atau penafsiran menggarap hasil-hasil analisis itu, membuat inferensi yang relevan dengan relasi penelitian yang dikaji, serta membuat kesimpulan tentang relasi tersebut. Peneliti yang menafsir hasil penelitian berupaya menemukan arti dan implikasi hasil-hasil itu.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena.

Hubberman dan Miles (dalam Fuad dan Nugroho, 2014:63-64) dimana ada tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Kegiatan analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*), dimana reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

### 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bisa dilakukan dalam sebuah matriks.

### 3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh, dimana kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## I. Teknik Keabsahan Data

Moleong (2015:330) mengatakan pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik yang paling banyak digunakan ialah pemerikasaan melalui sumber lainnya. Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan sumber yang sama.
3. Triangulasi penyidik, dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

4. Triangulasi dengan teori, fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal itu dapat dinamakan penjelasan banding. Sangat penting untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan atau penyaing.

Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hal itu dapat ditempuh dengan tahapan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara berbagai pihak, seperti : Kepala DPMD Kabupaten Pesawaran, Camat Negeri Katon, kepala desa, ketua BUMDes dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Mengonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Keterangan lain yang dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian dilapangan.
3. Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

#### 1. Letak Geografi

Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat  $104,92^0 - 105,34^0$  Bujur Timur (BT) dan  $5,12^0 - 5,84^0$  Lintang Selatan (LS). Luas wilayah Kabupaten Pesawaran ialah  $1.173,77 \text{ km}^2$  dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Teluk Betung dan Kabupaten Tanggamus  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Sejak tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan mengalami penambahan akibat pemekaran wilayah sehingga total kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran mencapai 11 kecamatan, diantaranya yaitu Kecamatan Teluk Pandan, Way Lima, Tegineneng, Way Ratai, Way Khilau, Padang Cermin, Negeri katon, Punduh Pidada, Kedondong, Gedong Tataan, Marga Punduh. Luas Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah

117.377 Ha dengan Kecamatan Negeri Katon sebagai wilayah terluas yaitu 15.269 Ha. 15.465 Ha dari luas wilayah Kabupaten Pesawaran digunakan sebagai lahan pertanian, sedangkan sisanya 109.912 Ha merupakan lahan bukan sawah dan bukan pertanian.

## **2. Keadaan Demografi**

Penduduk yang ada di Kabupaten Pesawaran sebanyak 436.389 jiwa yang terdiri dari 219.587 jiwa penduduk laki-laki dan 216.802 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran mencapai 363.26 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga mencapai 4 orang. Kepadatan penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Gedong Tataan sebesar 1.469 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Marga Punduh sebesar 106 jiwa/km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2015).

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Negeri Katon**

### **1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Negeri Katon**

Kecamatan Negeri Katon merupakan pemekaran dari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang di bentuk dari surat keputusan gubernur nomor g/305/b.11/hk/1990 tanggal 27 Agustus 1990 dan beribukota di Desa Negeri Katon. Luas wilayah Kecamatan Negeri Katon adalah sekitar 15.686 ha. Kondisi wilayah Kecamatan Negeri Katon adalah 70% dataran dan 30% berombak sampai bergunung.

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Negeri Katon ialah 21 desa dengan dusun sebanyak 115. Berikut dilampirkan tabel jumlah desa di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

**Tabel Jumlah Desa di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2018**

No	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Kagungan Ratu	550 Ha	1.798 jiwa
2.	Purworejo	375 Ha	3.127 jiwa
3.	Karang Rejo	264 Ha	3.582 jiwa
4.	Pujorahayu	475 Ha	3.198 jiwa
5.	Kalirejo	600 Ha	3.198 jiwa
6.	Negeri Katon	360 Ha	3.027 jiwa
7.	Tanjung Rejo	1.175 Ha	4. 595 jiwa
8	Halangan Ratu	1.530 Ha	3.656 jiwa
9.	Pejambon	700 Ha	3.447 jiwa
10.	Negara Saka	631 Ha	2.993 jiwa
11.	N. Ulangan Jaya	410 Ha	2.209 jiwa
12.	Tresno Maju	907,5 Ha	4.145 jiwa
13.	Lumbirejo	1.200 Ha	3.525 jiwa
14.	Roworejo	1.200 Ha	2.599 jiwa
15.	Poncokresno	1.192 Ha	3.053 jiwa
16.	Sidomulyo	1.820 Ha	4.961 jiwa
17.	Bangun Sari	362,5 Ha	3.489 jiwa
18.	Tri Rahayu	500 Ha	3.387 jiwa
19.	Sinar Bandung	329 Ha	2.263 jiwa
20.	Pujodadi	548,8 Ha	2.483 jiwa
21.	Grujungan Baru	556,3 Ha	2.810 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>15.686 Ha</b>	<b>68.888 jiwa</b>

Sumber : Dokumen Kecamatan Negeri Katon Tahun 2018.

## 2. Letak Geografi

Kecamatan Negeri Katon merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Letak Kecamatan Negeri Katon menurut batas wilayah ialah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Sebelah



Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sektor pendidikan yang ada pada Kecamatan Negeri Katon ialah 50 SD/MI, 15 SMP/MTS dan 5 SMA/SMK/MA.

### **3. Keadaan Demografi**

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Negeri Katon sekitar 68.844 jiwa, yang terdiri dari 35.384 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sekitar 33.460 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan jumlah KK (Kartu Keluarga ) sekitar 27.315 KK. Kecamatan Negeri Katon memiliki tingkat rata-rata sex ratio sebesar 1,05.

### **4 Keadaan Iklim**

Kecamatan Negeri Katon merupakan daerah tropis dengan curah hujan rata-rata sebesar 152,98 mm<sup>3</sup>/bulan, suhu udara rata-rata sebesar 26,69°C/bulan, dan rata-rata kelembaban udara sebesar 78,06%/bulan. Keadaan sumber air di Kecamatan Negeri Katon cukup baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari baik kebutuhan konsumsi dan kebutuhan lainnya. Sumber air penduduk berasal dari sumur dan sumber mata air yang disalurkan secara permanen.

### **C. Gambaran Umum Desa Purworejo**

Desa Purworejo yang terletak di wilayah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran merupakan desa agraris dan subur. Desa ini terletak disebelah barat Kecamatan Negeri Katon. Batas wilayah Desa Purworejo ialah sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Rejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegal Sari, sebelah timur berbatasan dengan desa Kagungan Ratu dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kali Rejo. Luas wilayah Desa Purworejo ialah 375 Ha dengan jumlah penduduk di Desa Purworejo mencapai 3.127 jiwa.

### **D. Gambaran Umum Desa Poncokresno**

Desa Poncokresno terbagi menjadi 12 dusun meliputi dusun Siti Rahayu, Sawangan, Pujodadi Barat, Pujodadi Timur, Talang Baru, Srinusabangsa Barat, Srinusabangsa Timur, Wonosari II, Wonosari I, Trikora, Sukosari dan Tanjungrejo. Batas wilayah Desa Poncokresno ialah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukoharum dan Desa Tri Rahayu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sriwedari dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukoharum Kabupaten Pringsewu.

Desa Poncokresno merupakan daerah pedalaman yang jauh dari perkotaan. Secara keseluruhan luas wilayah Desa Poncokresno adalah 27,05 km<sup>2</sup> atau 2.705 Ha dengan Dusun jumlah penduduk 3.053 jiwa dan Dusun Tanjungrejo sebagai dusun terluas yaitu 65 Ha. Dari keseluruhan tersebut 750 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 1955 Ha merupakan lahan bukan

jenis sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun.

#### **E. Gambaran Umum Desa Karang Rejo**

Desa Karang Rejo merupakan salah satu dari 21 desa yang ada di Kecamatan Negeri Katon. Desa Karang Rejo memiliki luas wilayah 380 Ha atau 3,80 km<sup>2</sup>. Berdasarkan topografi, Desa Karang Rejo merupakan daerah dengan dataran rendah dengan intensitas curah hujan sebesar 2.000-3.000 mm/th. Secara administrasi Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon memiliki batas-batas desa antar lain sebelah utara berbatasan dengan Desa Pujorahayu sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalirejo sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purworejo sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegalsari. Jumlah penduduk mencapai 3.582 jiwa yang terdiri dari 1845 jiwa laki-laki, 1.737 jiwa perempuan dan 975 kepala keluarga.

#### **F. Gambaran Umum Desa Sinar Bandung**

Desa Sinar Bandung merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Batas wilayah Desa Sinar Bandung ialah sebelah utara berbatasan dengan Desa Trimulyo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tri Rahayu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sinar Jati dan sebelah timur berbatasan dengan Gedong Gumanti. Luas wilayah Desa Sinar Bandung 339 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 2263 jiwa.

### **G. Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera ( GaDIS )**

Program GaDIS merupakan program Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk 44 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran. Program ini merupakan salah satu program unggulan di bumi andan jejama. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran, program GaDIS dimaksudkan untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri melalui penguatan BUMDes. Dalam <https://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.07 WIB) Bupati Pesawaran menyerahkan bantuan kepada 44 desa di aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat 17 September 2017 .

Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona dalam berita online [www.pesawarankab.co.id](http://www.pesawarankab.co.id) (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.10 WIB) menyatakan bahwa program Gerakan Desa Ikut Sejahtera yang kemudian di singkat (GaDIS) adalah inovasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai pemberian reward atau penghargaan kepada desa berprestasi yang ada di Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu tidak sembarang desa yang dapat menerima bantuan dana GaDIS. Beragam kriteria harus dapat dipenuhi oleh desa yang mendapat program GaDIS.

Adapun kriteria-kriteria desa yang menerima program GaDIS tercantum dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut :

1. Desa yang memperoleh Bantuan keuangan gadis adalah desa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan kriteria:
  - a. Berprestasi di tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi/nasional
  - b. Memiliki RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa
  - c. Memiliki tertib manajemen administrasi pemerintahan desa menurut standar evaluasi perkembangan desa.
  - d. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
  - e. Dalam hal tidak terdapat desa yang lunas PBB, maka akan mempertimbangkan desa dengan capaian PBB tertinggi.
  - f. Penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi APBDesa secara tepat waktu.
  - g. Memiliki BUMDes yang lengkap secara administrasi, meliputi berita acara pembentukan, peraturan desa tentang BUMDes, ADART, rencana usaha dan struktur organisasi yang proporsional serta sumber daya manusia yang profesional.
  - h. Melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan (SKL).
  - i. Memiliki perencanaan inovatif yang sinkron dengan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
  - j. Bersedia menandatangani fakta integritas.

2. Desa yang memperoleh bantuan keuangan GADIS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut dari program ini.
3. Desa-desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan GADIS dengan keputusan bupati.

Dendi Romadhona dalam berita online <https://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.23 WIB) menjelaskan bahwa sebagai program yang ditekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana GaDIS yang berjumlah 100 juta rupiah untuk setiap desa tersebut, merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) .

Lebih lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran M. Zuriadi dalam berita online <http://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.27 WIB ) memaparkan program GaDIS diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi desa melalui BUMDes serta memberikan peluang positif bagi Pendapatan Asli Desa (PAD) sehingga dapat menjadi salah satu cara efektif dalam rangka memberikan wahana aktualisasi desa dan masyarakat secara keseluruhan agar memperoleh nilai tambah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Rendy Ahades dalam beritan online <http://www.radarlamsel.com> (diakses pada 27 September 2018 pukul 09.27 WIB) menjelaskan dalam pengelolaan

BUMDes, kepala desa selaku penanggung jawab mutlak, wajib menandatangani fakta integritas demi implementasi tersebut. Sehingga dapat terukur, terencana dan berkelanjutan. Pada prinsipnya bantuan keuangan GaDIS ini merupakan inisiatif usulan yang direncanakan oleh masyarakat desa itu sendiri, baik itu mulai dari perencanaan, kegiatan berjalan semuanya harus ditentukan dan diputuskan secara bersama oleh masyarakat. Tidak hanya wilayah pesisir tetapi disetiap kecamatan, kepala desa secara profesional harus mengembangkan destinasi objek pariwisata sebagai salah satu unit usaha.

## **H. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha milik desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari masyarakat desa dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (6) tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 yang mengatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

## **2. Tujuan Dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Tujuan BUMDes adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan.



Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Selanjutnya BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti .D Prasetyo,2002 bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut diperkuat dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya di bangun atas

inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga ( UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 3). Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Perlu adanya upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

## **I. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan atau kekuatan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Suharto (2014:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik dan ekonomi.

Menurut Sumodingrat (dalam Mardikanto dan Soebiato,2015:33-34) pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif memenuhi proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan <http://id.m.wikipedia.org> (diakses pada 25 November 2018 pukul 14.33 WIB).

Subejo (dalam Mardikanto, 2013:45) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki

melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pada penelitian ini mengenai efektivitas pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon tahun 2017, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program GaDIS tahun 2017 di Kecamatan Negeri Katon sudah efektif karena :

1. Indikator pemahaman program, dikatakan efektif karena adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kecamatan Negeri Katon sampai kepada lembaga yang paling rendah yaitu desa/BUMDes serta adanya musyawarah untuk mengusulkan tiga kegiatan usaha yang akan dikelola.
2. Indikator Tepat Sasaran, dikatakan efektif karena desa yang memperoleh bantuan keuangan GaDIS adalah desa yang berprestasi dan memiliki BUMDes diantaranya mendapatkan juara pertama dalam acara lomba desa di Kecamatan Negeri Katon yaitu Desa Karang Rejo dan penerima pajak tertinggi yaitu Desa Sinar Bandung dan Poncokresno. Selain itu Desa Purworejo yang merupakan desa korban bencana banjir mendapatkan

program GaDIS agar dapat digunakan untuk mengembangkan desanya kembali.

3. Tepat waktu di katakan efektif karena pelaksanaan program GaDIS sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan Tiga dari empat desa yaitu Desa Karang Rejo, Poncokresno dan Sinar Bandung masih menjalankan tiga kegiatan usaha yang sesuai dengan perencanaan awal dan sesuai dengan potensi desa. Hanya satu Desa yaitu Desa Purworejo yang menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perencanaan awal yaitu pada usaha budidaya ikan lele menjadi usaha sewa tarup.
4. Tercapainya tujuan dikatakan efektif lebih banyak kegiatan usaha BUMDes yang memberdayakan masyarakat diantaranya 6 usaha seperti usaha LKM dan kerajinan tapis di Desa Karang Rejo, produksi kripik dan klanting serta ternak kambing di Desa Poncokresno, LKM / simpan pinjam di Desa Sinar Bandung dan sewa tarup di Desa Purworejo, sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sedangkan kegiatan usaha yang dinilai belum melibatkan masyarakat seperti budidaya ikan tawar di Desa Karang Rejo, Jual alat pertukangan di Desa Poncokresno, sewa alat pertanian dan ternak sapi di Desa Sinar Bandung serta usaha ternak kambing di Desa Purworejo.
5. Perubahan Nyata dikatakan efektif karena memaksimalkan BUMDes supaya maju dan bertambahnya unit usaha BUMDes, selain itu membuka lapangan kerja dan bertambahnya pendapatan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pada penelitian ini mengenai efektivitas pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kecamatan Negeri Katon tahun 2017, peneliti ingin memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan dan keberhasilan program GaDIS. Beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Tim koordinasi GaDIS diharapkan dapat melakukan monitoring setiap bulan agar dapat melihat perkembangan kegiatan usaha sebagai wujud dari pelaksanaan program GaDIS sehingga berbagai kendala di lapangan dapat di pecahkan berdasarkan pertimbangan penyelenggara program dan pelaksana program.
2. Mencari solusi dari setiap kelemahan usaha yang dikelola agar usaha BUMDes lebih maju
3. Memastikan agar seluruh masyarakat mengetahui kegiatan usaha yang dikelola BUMDes baik itu dari program GaDIS ataupun bukan, agar masyarakatpun dapat mendukung dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan usaha yang dikelola demi kemajuan desa bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ambar, Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta.
- Cansil dan Cristin. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Dharma, Agus. 2001. *Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Fuad, Anis dan Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Handayani, Soewarno. 1991. *Administrasi Pemerintahan Dalam pembangunan Nasional*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardikanto dan Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Moleong, J. Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muasaroh, Latifatul. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas*. Literatur Buku. Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Reflika Aditama. Bandung.



- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Erlangga. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.: Alfabeta. Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta.
- Zainal, Veithzal Rivai, dkk. 2014. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, Edisi Keempat*. Rajawali Pers. Jakarta.

## **Jurnal**

- Bungkaes H.R, J.H. Posumah Burhanudin Kiyai. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Taulud. *Jurnal Acta Diurna*. Vol. 2, No. 2, Hal : 1-23.
- Santer, Niko. 2015. Implementasi Program Gerakan Desa Membangun di Kecamatan Malinau Utara Kabupate Malinau .Studi Tentang Pembangunan infrastruktur Jalan di Desa Semanggaris dan Desa Luso. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol 3, No. 3, Hal : 237-251.

## **Skripsi**

- Batubara, Hidayat Rahmad. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Dewi, Intan Riana. 2016. *Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Hasanah, Nur. 2015. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Hayati, Zahrotul Fatimah. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Kelurahan Gedung Sari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang*. Universitas Islam Negeri Sunan kali Jaga. Yogyakarta.

Purnama, Putri Dian. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sinaga, Afrianita Chici. 2017. *Efektivitas Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruai Jurai Dalam pengentasan Desa Tertinggal (Studi Pada Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

## **Dokumen**

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **Sumber Lain**

<http://www.radarlamsel.com/bupati-dendi-luncurkan-program-gadis/>. Diakses pada 27 September 2018 pukul 09.07 WIB.

<http://www.pesawarankab.go.id/informasi-456-desa-menggeliat-disiram-gadis-html>. Diakses pada 27 September 2018 pukul 09.10 WIB.

<http://www.radarlamsel.com/dana-gadis-perkuat-bumdes/>. Diakses pada 27 September 2018 pukul 09.23 WIB.

<http://gerbangrepublik.com/2017/11/02/bupati-pesawaran-bagi-bagi-gadis-di-kecamatan>. Diakses pada 10 Oktober 2018 Pukul 15.43 WIB.

<http://m.suarapedia.com/detail/berita/10295/tiap/desa/di/pesawaran/terima/rp100/juta>. Diakses pada 28 Oktober 2018 Pukul 17.22 WIB.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemberdayaan-masyarakat>. Diakses pada 25 November 2018 pukul 14.33 WIB).